



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AL MAKIN
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 802256

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.550.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/117 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1250 m2/800 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000
3. Tanah Seluas 2006 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
4. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **165.000.000**

1. MOBIL, HONDA CITY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NXM Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **700.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **4.415.000.000**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **4.415.000.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.